

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*

Oleh : Erman Rajagukguk**

Pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan, pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah “*money laundering*” ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran, membeli perusahaan pencucian pakaian (laundramat). Pembelian ini bertujuan mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya.¹ Al Capone melakukannya pada tahun 1930-an, yang pada waktu itu hanya dianggap sebagai perbuatan penyalahan pajak (*tax evasion*).² Baru pada tahun 1986 di AS pencucian uang menjadi suatu perbuatan kriminal yang kemudian diikuti oleh berbagai negara.

Proses Pencucian Uang

Tujuan pencucian uang adalah memberikan legitimasi pada dana yang diperoleh secara tidak sah. Walaupun dapat dikatakan tidak ada sistem pencucian uang yang sama,

* Disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.

** Guru Besar Universitas Indonesia. Sarjana Hukum (SH) Universitas Indonesia (1974), LL.M. University of Washington, School of Law, Seattle (1984), Ph.D University of Washington, School of Law, Seattle (1988).

¹ Michael A. De Feo, “Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering”, Den. J. Int’l L & Pol’y, vol 18:3, (1990), h. 405.

² Billy @ Laundryman. U-net.com, 5 August 1998, Bil – 3/27.

tetapi pada umumnya proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap : *placement*, *layering* dan *integration*.³

Pertama, *placement* merupakan tahap permulaan, mengubah uang hasil kejahatan kedalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan, misalnya memasukkannya dalam deposito pada bank, polis asuransi atau membeli rumah, kapal pesiar, perhiasan.⁴ Pada tahap inilah pencucian uang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya.⁵ Berbagai negara memusatkan pemberantasan pencucian uang pada tahap ini.

Kedua, *layering* yaitu tahap pelapisan dimana pelaku menjalankan transaksi yang berlapis dan anonimitas. Menggunakan “*wire transfer*” melalui berbagai rekening, uang dapat dikirim ke berbagai negara, sehingga sulit untuk melacak asal muasal dana tersebut.⁶

Ketiga, *integration* adalah tahap dimana pelaku memasukkan kembali dana yang tidak tampak lagi asal usul aslinya kedalam transaksi yang sah, sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan ilegal. *Integration*, dilakukan dalam bentuk penjualan kembali saham, rumah, kapal atau perhiasan tadi.

Definisi Pencucian Uang

Definisi pencucian uang menjadi penting karena berkaitan dengan kejahatan ganda : kejahatan utama (*core crime*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan

³ Nicholas Clark, “The Impact of Recent Money Laundering Legislation on Financial Intermediaries,” *Dick J. Int'l.L.*, vol. 14, h. 470.

⁴ Daniel Mulligan, “Know Your Customer Regulations and The International Banking System : Towards A General Self Regulatory Regime“, *Fordham International Law Journal*, vol. 22, 1999, h. 2330.

⁵ Lee “Control Act”, h. 189-210.

⁶ Robert E. Taylor, “Ex-Smuggler Tells of Huge Profits Laundered, Placed at Major Banks, *Wall St. J.* (February 12, 1988) h. A. 4.

(*follow up crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang disebut sebagai *unlawful activity* atau *predicate offence*. Dalam menyusun definisi pencucian uang, sedikitnya ada empat pengertian.⁷

- (1) *Money laundering can be defined simply as a product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking.*
- (2) *Money laundering can be alternately be seen as a product of various crimes, including, but not limited to, drug trafficking. Such a definition could (and perhaps should) include an enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism.*
- (3) *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money laundering itself. In other words, whoever deals with money or other assets that he knows or must assume are the product of a crime meets the legal definition.*
- (4) *A fourth possibility is to include as money laundering any action by which somebody acquires, keeps, and/or maintains money or other assets that he knows or should know belongs to a criminal organization. Money laundering is not one of the most frequent activities of and impetus for criminal organizations.*

Perancis, Inggris dan beberapa negara yang menghadapi masalah serius dengan narkotik dan perdagangan gelap obat bius menggunakan definisi pertama. Amerika Serikat menggunakan definisi kedua, dimana pencucian uang tidak saja dana yang berasal dari kejahatan obat bius, tetapi sudah meliputi perampokan, pemalsuan dan terorisme.

Swiss menggunakan pengertian ketiga, dimana tidak hanya perbuatan pokok tetapi juga perbuatan pencucian uang itu sendiri, termasuk didalamnya.

Pengertian keempat dianggap oleh beberapa negara sebagai pengertian yang paling baik, karena sudah melibatkan orang lain yang bisa mengetahui dana tersebut patut diduga dari hasil suatu kejahatan.

⁷ Lutz Krauskopf, "Comment on Switzerland's Insider Trading, Money Laundering, and Banking Secrecy Laws", *Int'l Tax & Buss., Law* (1987) h. 286-287.

Amerika Serikat negara yang pertama memperluas pengertian pencucian uang dan penegakkan hukumnya melampaui batas-batas teritorialnya.

Negara itu melalui *Bank Secrecy Act* 1970 secara tidak langsung untuk pertama kalinya ingin mencegah praktek pencucian uang. Baru kemudian pada tahun 1986 lahir *Money Laundering Control Act* 1986, *Code of Federal Regulation – title 31 Money and Finance: Treasure – Part 103 (Financial Record-Keeping and Reporting of Currency and Foreign Transaction, Section 6501* dari Internal Revenue Code 1988, *The Anmunzio Wylie Anti Money Laundering Act (title XV)*.

Kemudian berturut-turut lahir *Money Laundering Prosecution Improvement Act of 1988*, *the 1994 Money Laundering Suppression Act* dan *Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act of 1998*.

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk menghancurkan penggunaan uang hasil kejahatan (hilir), sehingga diharapkan dengan demikian akan menghancurkan juga tindak kejahatan pokok di hulunya, seperti kejahatan narkotik, korupsi, penyelundupan senjata, perdagangan wanita dan anak-anak serta judi.

Canada

Peraturan kejahatan pencucian uang di Canada diatur dalam “*Control Drugs and Substances Act*” (1997), the Customs Act (1985), The Excise Act (1985) dan dalam Criminal Code. Ketentuan-ketentuan money laundering dalam keempat Undang-Undang tersebut adalah sama.

“*Control Drugs and Substances Act*” merupakan konsolidasi ketentuan-ketentuan dari “*Narcotic Control Act*” dan “*Food and Drugs Act*”. Quebec Court of Appeal dalam R.v. Hayes menyebutkan 4 unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan melakukan pencucian uang, yaitu⁸:

⁸ Arthur Pittman, “Money Laundering: A challenge for Canadian Law Enforcement.” Criminal Law Quarterly, Vol. 41 (1998) h. 252-255.

1. The Accused must deal with the laundered property.
2. With intent to conceal or convert the property.
3. The property must be derived from the commission of a predicate offence.
4. The Accused must know the Origin of the Property was from predicate offence.

Switzerland

Pada tahun 1990 pembaruan Undang-Undang Hukum Pidana Switzerland diterima oleh Swiss House of Representative (National rat) dan diratifikasi oleh Swiss Senate (Standeret). Peraturan baru tersebut menyebutkan :

*“ ... make it crime, subject to up to three years in prison and/or a fine, for any person to execute a transaction which could frustrate the determination of origin, discovery or for feuture of assects where such person “knew or must have assumed” that the assets in question stemmed from a crime, including a crime committed outside Switzerland.*⁹

Efektivitas peraturan baru ini diragukan, karena pembuktiannya yang sulit menurut hukum Swiss. Kesulitan lain adalah bahwa peraturan pencucian uang tidak mewajibkan bank-bank di Swiss untuk melaporkan transaksi-transaksi dalam jumlah tertentu yang mencurigakan. Pembaruan 2 pasal Swiss Criminal Code yaitu pasal 305 bis-Money Laundering dan 305 ter-Lack of vigilance in the field of financial transactions, adalah jawaban legislative terhadap kekhawatiran publik yang semakin besar terhadap perdagangan narkotik. Tambahan lagi pasal 305 ter bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dibidang transaksi keuangan, keterbukaan mana adalah perlu untuk memberantas pencucian uang, yang menjadi target dari pasal 305 bis.¹⁰

Portugal

Portugal dengan Decree - Law 15/93 menerapkan kerangka hukum yang ditujukan untuk memberantas narkotika baik pembuatan maupun penggunaannya. Undang-Undang yang

⁹ Rebecca G. Peters, “Money Laundering and its Current Status in Switzerland : New Disincentives for Financial Tourism, North Western Journal of International Law & Business 11 (1990) h. 132 - 133.

¹⁰ Shelby R du Pasquier and Andreas Von Planta, “Money Laundering in Switzerland,” International Business Lawyer (Oct. 1990), h. 396-397.

baru ini mengikuti UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic drugs and psychotropic. Pasal 60 menentukan bahwa.

“competent judiciary authorities may request of banks, financial institutions, public or private companies or corporation to furnish information or documentation concerning property or deposits pertaining to suspects or persons accused of the offences provided for under articles 21, 22, 24,25.

Pasal 21, 22, 24, 25 mengatakan :

*“... any person who, unlaw fully , produces, extracts, prepares, offers, sells, distributes, buys, transport, unperts or exports any substances or plants ...”.*¹¹

Dominika

Tiga bidang utama dalam Undang-Undang Money Laundering Dominika:

1. Sanksi kriminal kepada pihak-pihak atau lembaga keuangan yang terlibat melanggar peraturan money laundering.
2. Kewajiban pencatatan kepada lembaga-lembaga keuangan.
3. Kewajiban lembaga-lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi-informasi tertentu nasabahnya.

Hukuman setinggi-tingginya 5 tahun dan denda \$ 50.000 sampai \$ 100.000 dominika.

Pengadilan diperbolehkan menyita barang-barang hasil kejahatan tanpa persidangan terlebih dahulu. Institusi keuangan dapat didenda \$ 100.000 s/d \$ 2500 dominika bagi pelanggar Undang-Undang Money Undang Money Laundering. Kewajiban melaporkan transaksi yang melebihi \$ 10.000 atau transaksi yang berkali-kali (multiple transaction) sehingga melebihi \$ 10.000.¹²

Brazil

Pada tahun 1976, Brazil mengundangkan Law 6368, undang-undang pertama tentang narkotika. Undang-undang ini mencantumkan kriminalisasi illegal trafic dan penyalahgunaan obat-obatan yang mengakibatkan ketergantungan psychologi. Tidak

¹¹ Monica Quintas Roma, “Banking Confidentiality and state control of currency Transactions and related criminal Activities - Portugal” in P. Bernasconi (ed) Money Laundering and Banking Secrecy, Netherlands : Kluwer Law International, 1996. h. 214-215.

¹² Ricardo A. Pellerano and Eduardo Jorge, ”Money Laundering Rules in the Dominican Republic”, Banking Law Journal (1996) h. 137 - 140.

adanya koordinasi antara polisi, Dept. Kehakiman, Internal Revenue Services dan Bank Central menjadikan tidak mungkin mengawasi rekening-rekening yang mencurigakan dibawah undang-undang kerahasiaan bank. Baru pada tahun 1997, Pemerintah mengajukan proposal Undang-Undang Money Laundering. Bab I, kriminalisasi money laundering, besar hukuman, macam-macam perbuatan yang dikategorikan pencucian uang. Bab IV mengenai pernyataan barang asset dari kejahatan di luar negeri. Bab V. Daftar orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk memelihara catatan dan informasi kliennya, yaitu bank, perusahaan dan agen asuransi, financial institution, institusi yang bertanggung jawab untuk jaminan sosial dan kesejahteraan, institusi permodalan. Bab VI, kewajiban untuk melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan. Bab VII, melaporkan operasi keuangan. Bab VIII, tanggung jawab staf administrasi. Bab IX, pendirian Dewan Pengawas Aktivitas Keuangan yang mempunyai kekuasaan untuk menerima, meneliti, identifikasi dan pemeriksaan fakta-fakta yang mencurigakan pencucian uang.¹³

India

Di India, sistim pencucian uang menjadi lebih rumit dengan adanya bentuk bank bawah tanah yang dikenal dengan nama Hawala, Hawala, artinya penyediaan kode, telah berjalan berabad-abad sebelum sistim perbankan Barat datang. Hawala menjadi populer beberapa puluh tahun belakangan ini di India, karena bisa menjamin lancarnya arus uang dengan aman. Mereka yang ingin mengirimkan uangnya ke luar negeri menempatkan uangnya kepada “Hawala dealer”. Deposita juga memberikan kepada dealer kode yang harus ditunjukkan oleh siapa saja yang ingin mengakses uang tersebut melalui dealer dinegara lain. Beberapa tahun terakhir ini sistim tradisional Hawala dicurigai sebagai

¹³ Paulina L. Jerez, “Proposed Brazilian Money Laundering Legislation : Analysis and Recommendations,” *Am.V.J.Int’L L & Pol’y* Vol. 12:2 (1997). h. 351-355.

jalur pencucian uang. Undang-Undang Anti Pencucian Uang menjadi lebih penting lagi karena India menjadi pusat transit narkotik, terutama heroin. India terletak didaerah yang terkenal dengan Golden Crescent (bulan sabit emas, Iran, Turki, Pakistan, Afganistan) ke Barat dan Golden Triangle (segitiga emas) ke Timur.

Pada tahun 1997 India mulai merancang “The Money Laundering Prevention Bill.” Undang-undang ini antara lain memuat kriminalisasi money laundering, tanggung jawab financial Institution untuk melaporkan transaksi 10 juta rupee, dan kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan.¹⁴

Kerjasama Internasional

Pada tingkat Internasional suatu batu loncatan penting bagi terciptanya “*the International anti-money laundering legal regime*” adalah dengan lahirnya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau lebih dikenal dengan nama UN Drug Convention tahun 1988, dimana Indonesia sudah menjadi anggota tetapi belum meratifikasinya.¹⁵ Pada tanggal 19 Desember 1988, lahir UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances di Wina, Austria. Ditanda tangani oleh 106 negara. Konvensi ini merupakan kerangka untuk pengawasan internasional terhadap money laundering. Konvensi ini mewajibkan negara-negara penandatanganan menjadikan pencucian uang suatu perbuatan kriminal dan kejahatan berat. Negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah untuk membuat undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan Konvensi ini. 1988 juga lahir Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices terdiri dari perwakilan-perwakilan Bank Central dan badan-badan Pengawas negara-negara Industri. Bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menetapkan identitas nasabahnya, yang kemudian dengan “Know your-customer Rule”.

Selanjutnya pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung dalam Group 7 melahirkan pula “**the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)**” yang bertujuan mendorong negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan

¹⁴ Paulina L. Jerez, “Proposed Brazilian Money Laundering Legislation : Analysis and Recommendations,” *Am.V..J.Int’L L & Pol’y* Vol. 12:2 (1997) h. 351-355.

¹⁵ Kavita Natarajan, ”Combatting India’s Heroin Trade Through Anti Money Laundering Legislation,” *Fordham International Law Journal* vol . 21 (1998) h. 2064 - 2066.

untuk mencegah mengalirnya uang hasil perdagangan narkotik baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Pada bulan April 1990, FATF memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan 15 negara yang kemudian mengeluarkan rekomendasi yang paralel dengan UN Drug Convention agar negara-negara menciptakan peraturan perundang-undangan mengawasi “*money laundering*.”¹⁶

Pada tahun 1980an Dewan Masyarakat Eropah menyetujui sejumlah “Council Directive.” Fasilitas keuntungan dari tindak kejahatan dan penyusunan kategori baru dari kejahatan dikombinasikan dengan hilangnya penerimaan pajak dari kegiatan ekonomi bawah tanah dan ketakutan akan meluasnya korupsi dalam sistem keuangan dunia, mendorong Dewan Masyarakat Eropah untuk menyetujui arahan pencegahan penggunaan sistem keuangan bagi pencucian uang. Ketakutan dari para regulator keuangan, yaitu :

*“when credit and financial institutions are used to launder proceeds from criminal activities ... the soundness and stability of the (particular) institution concerned and confidence in the financial system as a whole could be seriously Jeopardized.”*¹⁷

Dua prinsip dalam European Community Council Directive adalah kriminalisasi pencucian uang di negara-negara anggota Masyarakat Eropah dan memperluas kerjasama diantara negara-negara anggota dalam pemeriksaan dan penuntutan pelaku pencucian uang, baik yang terjadi dinegara-negara anggota atau dinegara ketiga yang bukan anggota Masyarakat Eropah.¹⁸ Kemudian pada tahun 1991 Masyarakat Eropa mempertegas lagi langkah-langkah memerangi “*money laundering*” tersebut dengan mencantumkan ketentuan dalam pasal 57 dan pasal 100 a EEC Treaty. Pengertian “*money laundering*” dalam Treaty tersebut diambil dari Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention 1988), yaitu¹⁹ :

- the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such

¹⁶ 28 I.L.M. 493 (1983).

¹⁷ Geoffrey W. Smith, “Competition in the European Financial Services Industry : The Free Movement of Capital versus the Regulation of Money Laundering,” U.Pa.J.Int’L Bus.L. Vol. 13:1 (1992). h. 219.

¹⁸ cott E. Mortman, “Putting Starch in European Efforts to Combat Money Laundering,” Fordham Law Review vol. 60 (1992) h. S431.

¹⁹ Konstantin D. Magliveras, “Defeating the Money Launderer - The International and European Framework,” Journal of Business Law (March 92) h. 167.

activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action.

- the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from criminal activity or form an act of participation in such activity.

- the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time or receipt, that such property was derived from criminal activity or form an act of participation in such activity.

- participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing paragraphs.

Knowledge, intent or purpose required as an element of the abovementioned activities may be inferred from objective factual circumstances”.

Dalam tingkat regional Eropa, negara-negara setempat menandatangani Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation pada 12 September 1990.

“The convention provides a comprehensive set of rules, beginning with the initial investigation of an offense to the point at which a decision is made to confiscate the proceeds of criminal activity and this decision is ultimately enforced, perhaps by seizing and confiscating property located abroad.”²⁰

Konvensi ini mengharuskan kerjasama antar negara seluas mungkin. Langkah-langkah untuk memerangi money laundering telah dilakukan diberbagai negara antara lain seperti berikut ini²¹ :

1. Memperkuat proses pemeriksaan transaksi yang canggih. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki metode-metode pemeriksaan yang direkomendasikan oleh organisasi antar pemerintah seperti FATF dan Inter-American Abuse Control Commission.
2. Beberapa Rekomendasi yang dibuat oleh, antara lain, Council of Europe Money aundering Convention, the Anti-Laundering Directive of the European Community, the CIDAD model Regulations dan FATF menganjurkan Bank untuk menerapkan “*Know Your Customer*” (Kenali Nasabah Anda).
3. Lembaga Keuangan harus menyelidiki transaksi-transaksi yang jumlahnya besar, tidak biasa, kompleks, dan transaksi yang tidak mempunyai tujuan ekonomi. Lembaga Keuangan harus meneliti latar belakang dan tujuan transaksi-transaksi tersebut, membuat laporan tertulis, membantu para pengawas, auditor dan penegak hukum. FATF mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk menerapkan

²⁰ Hans G. Nilsson, “The Council of Europe Laundering Convention: A Recent Example of a Developing International Criminal Law,” Criminal Law Forum, vol. 2 No.3 (Spring 1991) h. 421.

²¹ Robert E. Powis, “Money Laundering : Problem and Solution,” The Bankers Megazine, Nov/Dec 1992. h. 54.

penelitian baik dalam transaksi antar bank maupun transaksi antara bank dan nasabahnya. Bank atau lembaga-lembaga keuangan harus mengidentifikasi dan melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak biasa. Ketentuan-ketentuan semacam itu harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan nasional.

4. Memonitor pembawa dana dalam bentuk tunai, atau pembawa perhiasan logam mulia dan permata kedalam suatu negara. FATF mengusulkan agar Pemerintah-Pemerintah

“consider the feasibility of subjecting all cross-border transfer, ..., to verification, administrative monitoring, declaration, or record-keeping requirements.”

Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pasal 1 menyebutkan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga (garis bawah dari penulis) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyumbangkan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Berkenaan dengan masalah “yang diketahuinya” terdapat perkara menarik di AS yaitu *United States v. Buena Vista Avenue, 113 S. Ct. 1126 (1993)* di mana pemilik rumah dituduh telah membeli rumah dengan dana yang harus diketahui berasal dari hasil kejahatan. Namun si pemilik mengajukan keberatan, bahwa dia “tidak mengetahui” asal uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut dan dia merasa sebagai *innocent owner*.

Dalam perkara ini, pemerintah mengajukan satu gugatan ‘in rem’ (kelembagaan) terhadap sebidang tanah dimana rumah si terdakwa berlokasi, dengan tuduhan bahwa dia telah membeli kekayaan tersebut dengan dana yang diberikan kepadanya oleh Joseph Brenna sebagai “hasil yang dapat diketahui asalnya” dari pengedaran obat terlarang dan illegal. Kekayaan tersebut oleh karenanya dapat dirampas dan disita berdasarkan Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act 1970, 21 U.S.C. Pasal 881(a)(6).

Pada tahun 1982, Joseph Brenna memberikan kepada tergugat sekitar \$ 240.000 untuk rumah di mana ia dan tiga anaknya sejak itu tinggal. Dari tahun 1981 sampai berpisahannya tahun 1987, ia tetap berhubungan pribadi dengan Brenna. Ada kemungkinan yang dapat dipercaya bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah adalah hasil dari perdagangan obat-obat terlarang, tetap tergugat bersumpah bahwa ia tidak mengetahui asal-usul dana tersebut.

Tergugat dalam klaimnya menyatakan ia adalah “innocent owner” berdasarkan § 881 (a)(6).

Pengadilan distrik menolak pembelaan ini berdasarkan 2 alasan: “First, it ruled that “innocent owner” defense may only be invoked by those who can demonstrate that they are

bonafide purchasers for value” (emphasis in original); Second, the court read the statute to offer the innocent owner defense only to persons who acquired an interest in the property before the act giving rise to the forfeiture took place”

Tergugat mengajukan banding. Pengadilan banding menolak argumen tergugat dengan mengatakan, “... respondent could not be an innocent owner unless she acquired the property before the drug transaction occurred.”

Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung Stevens, menetapkan bahwa: (1) perlindungan yang diperoleh oleh “para pemilik tak bersalah” berdasarkan ketentuan dari Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act 1970 tidak terbatas pada para pembeli ‘bona fide’; (2) doktrin yang didukung hubungan ‘common law’ tidak berarti kepemilikan pemerintah atas kekayaan tersebut (perumahan real estate) yang dibeli dengan uang hasil transaksi obat terlarang yang ilegal sebelum penyitaan telah diputuskan; dan, (3) amendemen tahun 1984 terhadap ‘Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act 1970’, yang menentukan hasil dari transaksi obat terlarang di AS setelah diberlakukannya amendemen, tersebut menyebabkan penyitaan, tidak berarti kepemilikan pemerintah atas kekayaan tersebut telah diputuskan.²²

Di Amerika Serikat berkenaan dengan menyembunyikan hasil tindak pidana dapat dilihat dalam perkara *United States v. Sanders*, 928 F 2rd. 940 10th. (1991).

Johnny Lee Sanders telah membeli dua buah mobil atas nama anak perempuannya dan Istri yang menanda-tangani pembelian tersebut atas nama anaknya. Pembelian ini dianggap sebagai upaya Sanders untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Vonis atas Sanders melanggar ketentuan pencucian uang adalah berdasarkan pembelian dua buah mobil : pada 6 Nopember 1986 membeli sebuah mobil Volvo dan pada 24 April 1987 membeli sebuah mobil Lincoln. Terdakwa memperdebatkan bahwa pembelian kedua buah mobil tersebut adalah transaksi komersial biasa dan bahwa bukti pada sidang pengadilan telah gagal untuk menetapkan bahwa transaksi ini dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil uang dari kejahatan penjualan obat terlarang.

Sebelumnya Sanders telah dituduh bersama 10 orang lainnya melanggar 60 kejahatan dan 41 diantaranya terbukti dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Distrik Barat Oklahoma. Dakwaan itu antara lain pencucian uang melanggar 18 U.S.C. 1956(a)(1)(B)(i).

Pada tingkat banding terhadap dakwaan pencucian uang dengan melakukan menyembunyikan hasil penjualan heroin dengan membeli dua buah mobil terdakwa menyatakan keberatannya. Pembelian itu tidak membuktikan maksud penyembunyian uang. Anak perempuan yang dimaksud hadir di tempat jual-beli mobil atau tidak lama sebelum transaksi, serta mengikutkan nama keluarga si terdakwa pada namanya sendiri. Terdakwa dan istrinya secara terang-terangan telah menggunakan kendaraan tersebut setelah dibeli.

Pengadilan banding berpendapat walaupun pembelian mobil Lincoln lebih memungkinkan untuk memvonis dari pada pembelian Volvo, pengadilan menetapkan bahwa bukti yang dihubungkan dengan pembelian Volvo juga tidak cukup untuk mendukung vonis terdakwa. Terdakwa telah membeli Lincoln atas nama anak perempuannya, dan bahwa Ny. Sanders telah menanda-tangani transaksi pembelian atas nama anak perempuan mereka. Pengadilan berkesimpulan bahwa kehadiran secara pribadi anak perempuan mereka beberapa saat setelah transaksi tersebut, dan fakta bahwa ada tertera nama keluarga terdakwa pada nama anak perempuannya, penggunaan mobil oleh terdakwa dan istrinya secara terang-terangan setelah transaksi pembelian, meruntuhkan argumen pemerintah (yang sebagian besar didasari pada

²² Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003. h. 230.

mengatasnamakan anak perempuan terdakwa dalam transaksi pembelian mobil) di mana pembelian mobil Lincoln dapat dianggap sebagai syarat dengan maksud menyembunyikan.

Akhirnya Court of Appeal antara lain menyatakan:

“... evidence of design to conceal the nature or source of the proceeds used to purchase to automobiles was in sufficient to support defendant’s convictions on money laundering charges.”²³

Pasal 2 UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memperluas pengertian hasil tindak pidana. Semula hanya 15 butir menjadi 25, dan jumlahnya tidak terbatas hanya Rp. 500.000.000,- seperti pasal 2 lama (UU No. 15 tahun 2002).

Pasal 2 (1) menyebutkan bahwa Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

²³ Ibid. h. 232-233.

Ayat 2 pasal ini menambahkan juga dengan Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Selanjutnya UU No. 25 tahun 2003 sebagai amandemen UU No. 15 tahun 2002, dalam pasal 3 menentukan apa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Kalau kita mengkaji pasal 3 ini, termasuk didalamnya Penyedia Jasa Keuangan. Sebelumnya dalam Ketentuan Umum disebutkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Rumusan diatas cukup luas dengan adanya kata-kata bersayap "... termasuk tetapi tidak terbatas pada ..."

Di Amerika Serikat dalam *United States v. Bucey*, 876 F2d 1297 (7th Cir. 1989), Terdakwa Bucey mendalilkan bahwa dia tidak mempunyai kewajiban melaporkan transaksi yang dilakukan karena dia merasa bukan Penyedia Jasa Keuangan. Perkara ini bermula ketika terdakwa Bucey dan Boston Witt, seorang mantan Jaksa Agung untuk Negara Bagian New Mexico, mendalangi dua skema kejahatan, yang salah satunya bertujuan mencuci uang. Untuk melaksanakan skema pencucian uang, Bucey mendirikan satu badan amal dengan nama "*Huguenot National Church*" yang menjadi saluran untuk mencuci uang. Bucey dan Witt mengenakan komisi untuk usahanya ini yang diberikan melalui "*church*" (gereja) tersebut.

Detektif John dan Don Smith bersaudara yang berpura-pura sebagai pedagang narkoba tertarik untuk mencucikan uang hasil kejahatan mereka. Pada Oktober 1985, Witt menemui Smith bersaudara dan memberi saran tentang bagaimana cara mencuci uang hasil kejahatan, yaitu dengan memindahkan uang tunai mereka ke luar negeri melalui lembaga amalnya sehingga tidak perlu bayar pajak. Witt juga membicarakan satu cara lain untuk mencuci uang melalui saluran-saluran yang dapat melipatgandakan uang mereka. Semua transaksi akan dilengkapi dengan dokumen palsu.

Setelah pertemuan bulan Oktober 1985, Witt menghubungi Bucey untuk membicarakan kemungkinan menukarkan uang tunai Smith bersaudara sebagai uang cek pada kasir rekening Huguenot Church. Hal tersebut dilakukan karena disebutkan bahwa uang tunai Smith bersaudara berasal dari sumber dana yang meragukan. Pada 4 November 1985, Witt menemui Smith bersaudara di Las Vegas untuk membicarakan cara-cara pencucian uang dengan lebih rinci. Disana Witt menjelaskan peranan Bucey, yang mengawasi rekening the Church, dan mengusulkan Smith bersaudara supaya mencuci uang depositonya yang ada di Amerika Serikat terlebih dahulu melalui transaksi dengan the Church. Menurut Witt dan Bucey, langkah ini diambil untuk mempersiapkan transaksi berikutnya dari luar negeri. Witt minta Smith bersaudara memindahkan uangnya ke Chicago dimana Bucey akan menukarnya (setelah dikurangi komisi) sebagai uang cek pada kasir the Church. Dokumentasi palsu akan menyebut "*cashier check*" the Church sebagai

pendapatan kegiatan bisnis yang dilakukan Smith bersaudara atas nama the Church. Kedua belah pihak setuju untuk memulai transaksi sebesar \$50.000 pada Freedom Federal Savings and Loan (“*Freedom Federal*”) di Chicago pada 6 Januari 1986.

Pada 6 Januari 1986, Witt dan Bucey menemui Smith bersaudara di Chicago untuk melakukan transaksi di “*Freedom Federal*” untuk disimpan pada rekening the Church dengan penjelasan untuk keperluan pembelian obat-obatan bagi korban gempa bumi di Meksiko. Sebagai jasa, kedua orang ini menerima \$8.000 sebagai uang muka dari 20% komisi dari \$50.000 yang ditransaksikan. Kemudian uang tersebut diambil dari kasir the Church sebesar \$40.000 untuk diteruskan kepada Smith bersaudara. Sebagai lazimnya, Bucey juga mengisi “*CTR*” (Currency Transaction Report) dengan penjelasan deposito tunai.

Pada 28 Januari, Bucey dan Witt merencanakan satu transaksi yang serupa dengan Dembitz, seorang agen rahasia pemerintah yang menyamar sebagai anggota komplotan pengedar narkoba Smith bersaudara. Transaksi uang sebesar \$100.000 dikurangi \$20.000 komisi dilakukan di “*Freedom Federal*” pada 20 Februari 1986 untuk didepositokan pada rekening the Church. Proses selanjutnya sama seperti yang dilakukan pada uangnya Smith bersaudara. Terdakwa yang dituduh karena pencucian uang menganggap bukan “*institusi finansial*”, sehingga tidak dapat divonis karena tidak melaporkan transaksi keuangannya setelah menerima uang yang lebih dari \$10.000; bahwa undang-undang mendefinisikan hanya “*institusi finansial*” saja yang wajib melapor misalnya, agen, kantor cabang, kantor dari seseorang yang mewakilinya; tidak diberlakukan terhadap individu. (31 U.S.C.A. Pasal 5313(a)).

Berkaitan dengan pelaporan yang harus dilakukan individu, hakim menolak dengan alasan bahwa kalau pembuat undang-undang menginginkan untuk memberlakukan juga terhadap nasabah maka sebaiknya diatur dengan jelas. Pengadilan menolak untuk menafsirkan undang-undang. Lihat *United States v. Anzalone*, 766 F 2d, 682. Selanjutnya pengadilan memutuskan ...”Hence, we conclude that allegations contained in count 8 and 9 of indictment, charge Bucey as a financial institution with a duty of file CTRs, are legally insufficient to establish violations of 31 U.S.C. Section 5313 and 5322(b).” Oleh karenanya tuntutan untuk ini tidak diterima.²⁴

Begitu juga istilah lain yang cukup penting adalah “*transaksi*”. Ketentuan Umum UU No. 25 tahun 2003 menyebutkan bahwa Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindah bukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

²⁴ Ibid h. 178-180.

Berkaitan dengan pengertian “*transaksi*” di AS suatu perkara yang menarik dalam *United States v. Gallo, 927 F2d. 815 (1991)*, dimana Gallo dianggap telah melakukan transaksi, sehingga membantu terjadinya pencucian uang.

Perkara bermula ketika Gallo ditangkap pada 12 Januari 1990, setelah polisi mendapat informasi dari DEA (Drug Enforcement Administration) yang memata-matai Miryam Balcazar dan Jose Antonio Cruz. Pada 12 Januari 1990, agen-agen DEA mengawasi kegiatan Cruz dan Balcazar sampai mereka mendapatkannya di tempat parkir “*skating rink*”, Kingwood (Texas). Agen DEA Turner membuntuti Cruz sampai pompa bensin dimana dia menelepon seseorang. Sekitar dua menit kemudian, Gallo datang mengendarai sedan Mazda RX7 warna coklat. Disana Cruz mengeluarkan kotak warna coklat dan memindahkannya ke bagasi belakang mobil Gallo. Setelah serah-terima kotak tersebut, mereka keluar tempat parkir dan mengendarai kendaraan mereka masing-masing dengan arah berlawanan. Agen Turner kemudian membuntuti Gallo dan berusaha untuk mencatat plat nomor mobil Gallo, tapi tertutup lumpur dan tidak bisa terbaca, sehingga Turner minta bantuan Kantor Kepolisian County Harris dan Departemen Kepolisian Houston (HPI).

Knott (dari HPI) berhasil mengejar Gallo, kemudian memeriksa isi kendaraan tersebut sesuai dengan prosedur HPD. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencatatan pada mobil Gallo, polisi membawa kendaraan tersebut ke kantor polisi terdekat dimana agen-agen DEA telah siap disana. Mereka memeriksa kembali kendaraan tadi dan menemukan uang sebanyak \$299.985 yang dibungkus dalam kertas aluminium. Sidik jari Balcazar juga terdapat disana. Gallo mengatakan kepada agen DEA bahwa dia tidak tahu bagaimana kotak tersebut bisa berada di mobilnya, dan bahwa seseorang telah menaruhnya di sana.

Balcazar dan Cruz juga ditangkap pada 12 Januari 1990. Ketika agen DEA menangkap Balcazar mereka menemukan sebuah kotak karton, persis sama dengan kotak yang ada dalam mobil Gallo, yang berisikan uang sejumlah \$300.000 dibungkus dalam kertas aluminium. Setelah memperoleh surat perintah penggeledahan di rumah Balcazar, mereka menemukan uang tunai sejumlah \$1.240.810, dan sebagian dibungkus dalam kertas aluminium dan ditaruh pada sebuah tas coklat dan dalam sebuah kotak karton. Mereka juga menemukan mesin hitung. Di rumah Cruz, mereka menemukan limapuluh kilogram kokain.

Gallo diadili oleh Pengadilan Distrik, dengan tuduhan memindahkan uang \$299.985 yang ditemukan di kotak karton di mobilnya dan mendapatkan Gallo bersalah. Gallo divonis karena dianggap telah membantu sehingga terjadinya pencucian uang sebagai melanggar 18 U.S.C. Art.1956(a)(1), yang melarang keterlibatan yang disadari dalam transaksi finansial yang menggunakan uang hasil bentuk-bentuk kegiatan yang tidak sah. Istilah “*transaksi*” termasuk “*transfer, penyerahan atau disposisi lainnya*” dari uang hasil kejahatan ini. 18 U.S.C. Art. 1956(c)(3). “*Transaksi finansial*” berarti “*perpindahan dana-dana melalui kawat atau peralatan lainnya... yang dengan cara apapun atau tingkat apapun berdampak pada perdagangan luar negeri antar negara bagian.*” 18 U.S.C. Pasal 1956(c)(4). Didasari pada kegiatan bersama-sama diantara Gallo, Cruz dan Balcazar, serta pernyataan

palsu Gallo, hakim berkesimpulan bahwa juri sepantasnya dapat menduga bahwa Gallo “mengetahui” bahwa dia telah membawa uang hasil kegiatan yang tidak sah. Terdakwa divonis Pengadilan Distrik Texas Selatan yang dipimpin Hakim Norman W. Black, dengan tuntutan berbagai pelanggaran obat terlarang dan pencucian uang. Pengadilan Banding menyatakan vonis pencucian uang cukup didukung dengan bukti dimana terdakwa ditangkap ketika membawa hampir \$300.000 dalam kotak di mobilnya pada jalan bebas hambatan antar Negara Bagian. Terdakwa telah menerima uang dari yang diduga pengedar obat terlarang, dan terdakwa telah membuat dua surat pernyataan klarifikasi palsu tentang kendaraan dan kotak setelah ditangkap. Menurut hakim Edith H. Jones, terdakwa-Jose Alvaro Gallo divonis karena bersekongkol untuk memiliki obat terlarang dan bertujuan untuk mengedarkan kelebihan lima kilogram kokain, dan membantu terjadinya (“*aiding and abetting*”) pencucian uang.²⁵

Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai : penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.

Dalam hal ini pelaku tidak harus mereka yang melakukan langsung tindak pidana pokok. Di Amerika Serikat beberapa perkara pencucian uang, menunjukkan bahwa pelaku bukan termasuk orang yang terlibat langsung dengan kejahatan utamanya. Antara lain dalam perkara *United States v. Thompson III, 603 F.2d 1200 (1979)*:

Perkara ini bermula ketika George Thompson III pada tahun 1974, seorang Pimpinan Bank Ridglea, memberikan serangkaian pinjaman kepada seorang pemain musik jazz Michael E. Welch untuk membeli peralatan musik. Welch kesulitan untuk mengembalikan pinjaman tersebut, kemudian pada tahun 1976 dia membujuk Thompson untuk meminjamkan uang lagi, tetapi kali ini membeli mariyuana. Selanjutnya akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar hutangnya. Di persidangan, Welch menyatakan bahwa Thompson mengetahui pinjaman tersebut untuk membeli cocaine. Pernyataan mana ditolak oleh Thompson. Pada tanggal 9 Maret 1977, Welch menemui Thompson untuk mendapatkan pinjaman berikutnya berjumlah \$ 45.000. Thompson menyarankan untuk dipecah dalam lima transaksi masing-masing \$ 9.000, untuk menghindari kewajiban pelaporan. Welch menyatakan dalam kesaksiannya, bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli 2 ponds cocaine. Tidak ada laporan transaksi keuangan (CTR) untuk pinjaman tanggal 9 Maret 1977. Pada 12 Maret 1979, George Thompson III dinyatakan bersalah karena mengakibatkan

²⁵ Ibid h. 185-187.

Ridglea Bank of Fort Worth, Texas, tidak menyampaikan laporan transaksi keuangannya (CTR), 31 U.S.C. Art. 1059, 1081. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran undang-undang federal lainnya, yaitu 18 U.S.C. Pasal 2(b). Terdakwa juga dianggap membantu Michael E. Welch yang secara sadar dan sengaja memiliki mariyuana dan heroin untuk diedarkan, melanggar 21 U.S.C. Art. 841(a)(1).²⁶

Pasal 8 menyebutkan Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPAK sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak 1 milyar.

Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Dalam perkara lain yang juga berkaitan dengan persekongkolan adalah *United States v. American Investors of Pittsburgh, Inc.*, 879 F.2d 1087 (3rd Cir.1989):

Para terdakwa divonis di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Pennsylvania, yang dipimpin Hakim Glenn E. Mencer, karena melanggar Undang-undang Laporan Transaksi Keuangan. Perkara ini bermula ketika American Investors of Pittsburgh, sebuah perusahaan pialang dan agen saham, yang terdaftar pada Securities and Exchange Commission dan anggota National Association of Securities Dealers, berlokasi di Pittsburgh, Pennsylvania, tidak pernah menyampaikan laporan CTR-nya untuk jumlah \$10.000, walaupun telah mendokumentasikan secara internal dengan baik. Dakwaan menggambarkan satu skema dimana American Investors merancang berbagai manipulasi penyimpanan catatan untuk mengelabui seolah-olah penerimaan uang tunai dari nasabahnya, termasuk Alan Zytnick.

Cara yang dilakukan oleh Sekretaris-Bendahara perusahaan, Charles Krzywicki, termasuk menggunakan rekening yang sudah tidak aktif untuk mengubah catatan pembelian obligasi dan saham secara tunai oleh nasabah. Teknik penyembunyian lainnya, sering digunakan oleh Dirut Perusahaan John Bruno dan Wakil Dirut John Mendicino, termasuk mengubah data baik pada catatan internal perusahaan maupun pada laporan bulanan pada nasabah untuk memperlihatkan bahwa pembelian tunai diatas \$10.000 yang terjadi pada satu hari tidak digambarkan dengan benar dan seolah-olah terjadi beberapa hari dan nilainya kurang dari \$10.000.

Salah seorang nasabahnya Zytnick berpendirian bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung keputusan bersalah terhadapnya baik untuk bersekongkol maupun telah membantu mengakibatkan American Investors mengelak dari ketentuan pelaporan keuangan. Dia hanyalah seorang nasabah yang tak berdosa, yang seperti nasabah lainnya, tidak menyadari

²⁶ Ibid h. 213.

ataupun tidak berkepentingan dengan tugas American Investors untuk menyampaikan CTR untuk setiap transaksi tunainya.

Pengadilan banding, yang dipimpin Hakim Mansmann pada Sidang Ketiga menetapkan, bahwa nasabah bank, yang ikut serta dalam pencucian uang, dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana karena melanggar Undang-undang tersebut melalui strukturisasi transaksi dengan maksud untuk menghalangi petugas bank menyampaikan laporan transaksi. Walaupun nasabah lembaga keuangan tidak dapat dinyatakan bersalah karena pelanggaran lembaga keuangan atas Undang Undang Laporan Transaksi Keuangan; kombinasi lembaga keuangan untuk melakukan kejahatan, dengan tindakan kesengajaan nasabah untuk mengabaikan kewajiban lembaga keuangan, dapat mendukung penjatuhan vonis atas nasabah. 18 U.S.C.A. Pasal 2(b); 31 U.S.C.A. Pasal 5322.²⁷

Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 300 juta.

Ada putusan pengadilan yang menarik di Amerika Serikat, mengenai kewajiban seperti disebut di atas. Sebagai contoh perkara yang muncul di Amerika Serikat berkenaan dengan keharusan melaporkan mata uang yang masuk dan keluar dari Amerika Serikat misalnya dalam *United States v. Yuan, 545, F. 2d 314 (2 Cir. 1976)*:

Perkara bermula ketika terdakwa Mrs San Yuan masuk ke Amerika Serikat dari Canada dengan bus. Pada gerbang masuk petugas bea cukai memeriksa dua bungkus berwarna coklat yang dibawa oleh Mrs. Yuan dan menanyakan isinya. Mrs. Yuan menyatakan isi dari paket-paket itu adalah buku. Dalam pemeriksaan ternyata di dalam bungkus tersebut berisi uang \$ 77.500,- Mrs San Yuan sebelumnya tidak pernah diberi "the Customs Declaration Form 6059-B" yang antara lain berisi pertanyaan "Are you ... carrying over \$ 5.000,- in coin currency or monetary instruments?." Setelah menemukan uang tersebut, petugas itu memberikannya kepada atasannya (Entry Port Director). Setelah beberapa jam pemeriksaan kepada terdakwa diperlihatkan "Form 4790", dan menyatakan bahwa petugas akan menyimpan uang tersebut, tanpa mengindahkan apakah "form" tersebut ditandatangani atau tidak. Mrs. San Yuan tidak mau menandatangani.

Dalam persidangan, Pemerintah menyatakan, bahwa kejahatan membawa uang lebih dari \$ 5.000. masuk ke Amerika Serikat tanpa mengisi laporan telah dilakukan di atas bus; sebelumnya Form 4790 telah diberikan pada Mrs. San Juan.

Pengadilan tidak sependapat dan menyatakan bahwa "without proof any knowledge of, or notice to Mrs. San Yuan of the reporting requirements, a jury could not determine beyond a reasonable doubt that she had requisite willful intent". Kemudian Pengadilan juga mengingatkan bahwa Mrs San Yuan tidak dituduh karena membawa uang tunai masuk ke Amerika, tetapi berkaitan dengan tidak melakukan pelaporan karena membawa uang tersebut. Bukti mengenai maksud untuk tidak mengisi laporan tersebut adalah sangat lemah. Pengadilan menyimpulkan untuk membuktikan willfulness Pemerintah sebaiknya membuat upaya-upaya untuk memberitahukan kewajiban pelaporan kepada traveller.

²⁷ Ibid h. 236-237.

Pengadilan juga menyatakan bahwa perkara ini harus ditolak karena tidak mungkin untuk membuktikan “beyond a reasonable doubt that the defendant acted with knowledge of the reporting requirements”.

Kegagalan Pemerintah dalam memberitahukan kewajiban tersebut adalah fatal. Membawa uang dalam jumlah lebih dari \$ 5.000,- ke suatu negara adalah tidak illegal dan bahkan juga tidak “immoral”. Apa yang diwajibkan semata-mata mengenai kewajiban mengisi form dengan tepat. Dalam perkara tersebut pembuktian mengenai “knowledge” dan “willfulness” oleh karenanya hampir tidak mungkin kecuali Pemerintah sebelumnya telah mengambil suatu langkah untuk membuat kewajiban tersebut diketahui oleh para “traveler”.

Pemerintah berargumentasi bahwa terdakwa seharusnya sudah tahu tentang kewajiban pelaporan tersebut, ketika kepadanya diajukan pertanyaan dalam “Customs Declaration Form” tersebut. Pengadilan menolak pernyataan ini dengan alasan jika suatu pertanyaan semata-mata dimaksudkan untuk membuat traveler berpikir bahwa membawa uang sejumlah tertentu masuk ke suatu negara adalah ilegal. Permasalahan yang timbul adalah tidak ada satu pemberitahuan kepada traveler bahwa masuk dan keluar suatu negara dengan membawa uang lebih dari \$ 5.000,— adalah sah-sah saja asal formulir pelaporan tersebut diisi. Meskipun jawaban yang tidak jujur dari terdakwa membuktikan bahwa “beyond reasonable doubt” bahwa dia mengetahui kewajiban untuk mengisinya. Jawaban yang tidak jujur dengan demikian sangat mudah didesak melalui pertanyaan pada form tersebut yang menyebabkan traveler yang masuk ke suatu negara dengan uang lebih dari \$ 5000, berpikir bahwa dengan memiliki uang tersebut dengan sendirinya illegal. Oleh karenanya siapa yang menjawab tidak jujur itu dalam rangka mencoba menghindari tuntutan melanggar hukum. Pengadilan tidak menerima pendirian pemerintah yang menyatakan bahwa kesalahan pengisian form oleh terdakwa membuktikan bahwa dia telah mengetahui sebagian dari kewajiban pelaporan tersebut.

Pengadilan memberikan pendapatnya, agar permasalahan tersebut tidak terulang maka ada solusi yang sederhana yaitu dengan menambahkan kalimat pada “Custom Declaration Forms” dengan ... “if you are carrying greater than \$ 5.000. you are required by law to fill out certain form”. Kalimat tersebut harus ditempatkan dan diberitahukan kepada seluruh traveler. Alternatif lain adalah jika petugas bea cukai menemukan traveler yang membawa sejumlah uang lebih dari \$ 5.000. adalah tidak illegal tetapi hukum mewajibkan untuk melengkapi dengan form tambahan yaitu Form 4790 dan kemudian menyediakan dokumen yang cocok. Prosedur ini juga harus diberitahukan kepada “traveler”. Sayangnya pemberitahuan itu tidak dilakukan oleh Pemerintah. Akibatnya adalah tidak mungkin untuk membuktikan bahwa traveler mengetahui dan sengaja melanggar hukum. Konsekuensinya putusan Pengadilan Distrik harus ditolak, dan bahwa pengadilan banding secara langsung memberikan putusan bebas.²⁸

Perkara lain yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pelaporan ketika memasuki atau meninggalkan suatu negara dengan membawa uang dalam jumlah tertentu, terdapat pada perkara *United States v. Granda*, 565 F. 2d 992 (5th. Cir 1978):

Araceli Cremata Granda telah di hukum oleh Pengadilan Distrik Florida Selatan karena melanggar ketentuan 31 U.S.C.S. 1058 dan 1101, tentang “knowingly and willfully transporting monetary instruments in an amount exceeding \$ 5.000, into the United States”, dan terdakwa mwnngajukan banding. Perkara diawali ketika Granda kembali ke Amerika Serikat dari Panama. Ketika tiba di Miami International Airport dia memberikan “Custom Declaration Card” (Form 6059-B) kepada petugas bea cukai, kartu tersebut telah ditandatangani. Dalam Form tersebut termasuk berisi pertanyaan “whether you or anyone else in your party is carrying over

²⁸ Ibid h. 251-253

\$ 5.000, in coin, currency, or negotiable instruments". Kolom 'no' pada form terdakwa telah diperiksa. Selama pemeriksaan tersebut petugas bea cukai melihat ada uang \$ 5000 dalam amplop terbuka dan \$ 5000 juga terdapat di dalam dompet tersebut. Terdakwa menyatakan bahwa uang \$ 5000 tersebut milik temannya tetapi teman tersebut tidak dapat ditemui untuk diperiksa. Selain itu terdakwa juga menyatakan bahwa dia tidak tahu kewajiban pelaporan. Granda telah kooperatif dalam pemeriksaan dan segera petugas bea cukai menasehatinya dan memberikan form 4790 untuk diisi dalam rangka pemenuhan form 1101, petugas bea cukai akhirnya menyita \$ 10000 dan menahan terdakwa. Terdakwa juga menyatakan bahwa teman perjalannya yang mengisi tersebut dan memberikan kepada dia dan untuk ditandatangani tanpa terlebih dahulu dibacanya. Pemeriksaan atas form ini merupakan salah satu yang mungkin terjadi.

Pengadilan banding menolak putusan pengadilan distrik dengan menyatakan bahwa ketentuan "knowing and willful" pada 1101 dan 1058 mewajibkan bahwa terdakwa mengetahui kewajiban dan pelaporan dan terdakwa juga harus mempunyai "specific intent" untuk melanggar ketentuan ini. Pengadilan distrik juga menyatakan salah dalam "failing to provide an instruction on specific intent", dan terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Pengadilan banding juga menyatakan ketentuan "knowing and willful" dalam kewajiban pelaporan menghancurkan adanya bukti bahwa terdakwa mengetahui kewajiban pelaporan tersebut. Terdakwa harus bermaksud untuk melakukan kejahatan tersebut. Kedua masalah ini tidak terbukti dan form tersebut tidak diketahui.²⁹

Selanjutnya perkara *United States v. Bajakajian*, No.96-1487, November, 4 1997.

Perkara ini melibatkan orang asing Hosep Krikor Bajakajian yang membawa uang tunai \$357.144 dari Los Angeles ke Italia, tanpa melapor seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Federal. Selain tentang keharusan pelaporan dalam perkara ini juga dibahas mengenai sanksi penyitaan terhadap uang yang tidak dilaporkan tersebut.

Pada 9 Juni 1994, responden, istri dan dua anak gadisnya sedang menunggu di Bandara Los Angeles untuk penerbangan ke Italia; tujuan akhir penerbangannya adalah Siprus. Dengan menggunakan anjing pelacak uang, petugas-petugas bea-cukai menemukan sekitar \$230.000 tunai pada beberapa bagasi keluarga Bajakajian. Setelah seluruh bagasinya diperiksa ternyata jumlah uang yang dibawa adalah \$357.144 tunai. Karena keluarga Bajakajian tidak bersedia melapor telah membawa uang lebih dari \$10.000 sesuai ketentuan yang ada, maka uang yang mereka bawa disita dan mereka ditahan.

Juri menuduh dengan dengan tiga hal. Pertama mengenai tidak bersedia melapor uang bawaannya yang melebihi \$10.000 keluar AS, seperti yang dipersyaratkan oleh 31 U.S.C. Pasal 5316(a)(1)(A), dan karena melakukannya dengan "sengaja" maka dianggap melanggar Pasal 5322(a). Kedua menuduhnya telah membuat satu pernyataan material yang palsu kepada Jawatan Kepabeanan AS, dan dianggap melanggar 18 U.S.C. Pasal 1001. Ketiga mengenai tuntutan untuk menyita \$357.144 sesuai dengan 18 U.S.C. Pasal 982(a)(1), yang menetapkan:

"Pengadilan, dalam mengenakan hukuman pada seseorang yang dihukum karena pelanggaran terhadap seksi ... 5316 ... harus diperintahkan bahwa kekayaan orang tersebut, baik berupa barang atau bukan, atau kekayaan apapun yang dapat dilacak sumbernya, harus disita bagi AS, 18 U.S.C. Pasal 982(a)(1)."

Terdakwa dinyatakan bersalah karena tidak melapor berdasarkan Tuduhan Satu; Pemerintah sepakat untuk menolak tuduhan pernyataan palsu dalam Tuduhan Dua; dan

²⁹ Ibid h. 253-254.

terdakwa memilih untuk suatu “bench trial” (pengadilan tanpa juri) mengenai penyitaan pada Tuduhan Tiga. Setelah “bench trial” tersebut, Pengadilan Distrik memutuskan bahwa keseluruhan uang \$357.144 harus disita karena hal itu tersangkut dalam pelanggaran. Pengadilan juga memutuskan bahwa dana-dana tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan lainnya dan bahwa terdakwa telah membawa uang tersebut untuk membayar kembali hutangnya yang sah. Pengadilan Distrik selanjutnya mendapatkan bahwa bahwa dia tidak melapor telah membawa uang tersebut keluar Amerika Serikat karena khawatir adanya “perbedaan budaya.” Terdakwa yang telah lama menjadi anggota minoritas Armenia di Syria, memiliki “ketidakpercayaan kepada Pemerintah.”

Permasalahan yang muncul adalah apakah adil apabila seluruh harta terdakwa harus disita. Kesimpulan yang diambil bahwa penyitaan akan sangat tidak proporsional terhadap pelanggaran yang dimaksud dan sehingga akan melanggar Excessive Fines Clause dari Amendemen Kedelapan, maka pengadilan hanya memerintahkan penyitaan sejumlah \$15.000, dengan tiga tahun hukuman percobaan serta denda maksimum sebesar \$5.000 berdasarkan Petunjuk-petunjuk Penghukuman (Sentencing Guidelines).

Sidang Kesembilan Mahkamah Agung menyetujui, bahwa suatu penyitaan harus memenuhi dua syarat. Klausul tersebut (Excessive Fines Clause): Kekayaan yang disita harus merupakan “alat” (instrumen) dari kejahatan yang dilakukan, dan nilai kekayaan harus proporsional dengan kesalahan si pemilik. Mahkamah Agung menetapkan bahwa uang si terdakwa bukanlah “alat” dari kejahatan karena tidak melapor, yang tersangkut dengan penyembunyian informasi dari pada kepemilikan atau pengiriman uang; bahwa, oleh karena itu, Pasal 982(a)(1) belum dapat memenuhi Klausul tersebut mengenai kasus penyitaan uang; bahwa hal itu tidak perlu memberlakukan ayat “proporsionalitas” atas pengujian tersebut; dan bahwa Klausul tersebut tidak membolehkan penyitaan terhadap uang apapun yang tidak dilaporkan, tapi bahwa pengadilan lemah yurisdiksinya untuk membatalkan penyitaan \$15.000 karena terdakwa tidak melakukan “cross-appeal” untuk mempersoalkannya.³⁰

Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah, antara lain (b) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; ...

Selanjutnya Pasal 13 menyebutkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal, antara lain (b) Transaksi Keuangan Yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

³⁰ Ibid h. 254-255.

Banyak keputusan Pengadilan di AS sehubungan dengan "restructuring" ini.

Misalnya, dalam *United States v. Wollman*, 945 F.2d 79 (4th Cir 1991):

Robert dan Rosalie Wollman memiliki satu rekening bank pada Maryland National Bank. Antara 10 Januari dan 17 Januari 1989, pasangan ini telah menyetorkan tujuh belas simpanan senilai \$160.000 ke dalam rekening mereka. Enambelas setoran diantaranya masing bernilai \$9.500 dan satu rekening dengan nilai \$8.000. Setoran ini berlangsung pada empat hari yang berbeda pada lima cabang bank tersebut. Pada tiga peristiwa, pasangan Wollman menyetorkannya pada cabang yang sama, yaitu satu di dalam bank dan yang satunya lagi pada teller yang berbeda sepuluh menit satu dengan lainnya. Pada tanggal 12 dan 17 Januari 1989, Robert Wollman menulis tiga lembar cek, masing-masing bernilai \$50.000 yang ditarik dari rekeningnya di Maryland National Bank, untuk dimasukkan menjadi Certificate of Deposit (CD) pada rekeningnya di tiga bank lainnya. Pada 14 Februari 1989, IRS menyita aset tersebut dalam bentuk rekening CD, dengan pertimbangan bahwa rekening tersebut telah menjadi permasalahan pokok transaksi perbankan yang telah distrukturisasi yang dimaksudkan untuk menggelapkan persyaratan 31 U.S.C. Pasal 5313(a) dan pelaksanaan peraturan bahwa bank harus melapor semua transaksi tunai yang melebihi nilai \$10.000. Pemerintah kemudian menyampaikan keberatannya supaya dapat melakukan penyitaan perdata terhadap dana-dana tersebut seperti tercantum dalam 18 U.S.C. Pasal 981(a)(1) (Supp. 1990).

Penemuan berikutnya diperoleh dari hasil interogasi, pasangan Wollman menyatakan bahwa pada satu waktu sebelum bulan Januari 1989, Robert berusaha untuk menyetor satu simpanan uang melebihi \$10.000 dan kemudian diberitahu oleh seorang teller bahwa transaksi tersebut mengharuskan pengisian formulir untuk disampaikan kepada IRS. Hasil interogasi tersebut mengungkapkan bahwa teller menganjurkan Robert mengurangi simpanan tunai yang nilainya kurang dari \$10.000 untuk tujuan menghindari "ketidaknyamanan" dalam menyampaikan formulir IRS.

Para deposan menyadari adanya persyaratan pelaporan transaksi keuangan, setoran mereka distrukturisasi dengan tujuan untuk menggelapkan persyaratan tadi, tidak dapat menghindari penyitaan uang atas dasar bahwa penggelapan adalah hanya untuk kesenangan dan tidak takut dengan kesulitan Internal Revenue Services. 18 U.S.C.A. Pasal 981(a)(1); 31 U.S.C.A. Pasal 5313(a); 5324(3).

Perkara banding ini merupakan perkara pemberian 'summary judgment' pengadilan distrik Maryland di Baltimore dalam satu proses penyitaan perdata terhadap Robert dan Rosalie Wollman. Pengadilan telah menetapkan bahwa sebagai suatu permasalahan hukum mengenai catatan 'summary judgment' pasangan Wollman telah sengaja menstrukturisasi beberapa simpanan uang ke dalam rekening mereka pada Maryland National Bank untuk tujuan menghindarkan kewajiban pelaporan transaksi keuangan. Pengadilan setuju bahwa tidak ada fakta yang benar-benar murni mengenai apakah pasangan Wollman menyadari atas perbuatan tersebut; dan apakah mereka telah bertindak untuk menghindarkan dan bahwa pemerintah berhak untuk menyatakan sebagai permasalahan hukum dan untuk memperoleh 'summary judgement'.

Pemerintah meminta 'summary judgement', dengan pertimbangan bahwa materi 'summary judgment' yang diperlihatkan tanpa perselisihan faktual bahwa pasangan Wollman telah mengetahui persyaratan pelaporan dan dengan sengaja menstrukturisasi simpanan mereka supaya dapat menghindari bank membuat laporan tentang setoran mereka. Pasangan Wollman hanya menjawab bahwa tujuan memilah-milah setoran mereka bukan untuk menghalangi persyaratan pelaporan, tapi hanya untuk menghindari kesulitan IRS. Pengadilan distrik mula-mula menolak 'summary judgment' dengan kesimpulan bahwa perselisihan telah timbul dengan adanya maksud tertentu dari pasangan Wollman dalam menstrukturisasi simpanan mereka. Pemerintah kemudian mengajukan satu mosi untuk dipertimbangkan kembali, dengan menunjuk keputusan-keputusan yang menyarankan bahwa kehati-hatian dalam menstrukturisasi undang-undang adalah tidak relevan untuk tujuan penyitaan. Pemerintah berpendapat bahwa penyitaan adalah pantas bilamana seorang penggugat adalah sadar atas adanya kewajiban pelaporan, tapi telah bertindak untuk menghindarinya. Setelah menerima

penjelasan tambahan ini, pengadilan mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya dan memberi 'summary judgment' kepada pemerintah.³¹

Perkara selanjutnya, dalam *United States v. Dashney*, 937 F.2d. 532 (10th Cir. 1991), di mana Pengadilan Distrik Colorado, yang dipimpin Hakim Ketua Sherman G. Finesilver, memberikan vonis terdakwa berdasarkan tuduhan karena menstrukturisasi dan percobaan untuk menstrukturisasi transaksi tunai yang melebihi \$10.000 supaya terhindar dari kewajiban bank untuk melaporkan transaksinya.

Perkara berawal ketika Desember 1989 Dashney memenangkan sekitar \$ US. 92,400. tunai dari permainan blackjack di Mirage Hotel, Las Vegas. Kemudian Dashney pergi ke Florida menemui brokernya di Dean Witter dimana dia mempunyai rekening. Dia menyatakan bahwa dia tidak mau menyimpannya di bank karena tidak mau kena pajak. Kemudian dia terbang ke Colorado, menyewa mobil dan membayarnya dengan tunai, serta menemui teman wanitanya Jarret. Ia kemudian membuat SIM menggunakan alamat Jerret. Pada 4 Desember 1989 mereka pergi ke Denver membeli 11 cek dari 8 bank yang berbeda dan masing-masing kurang dari \$. US 10.000. Hal ini dilakukan setelah dia mendapatkan penjelasan dari teller bahwa apabila dia membeli \$10.000 atau lebih, maka harus mengisi CTR. Dashney menyatakan dia hanya menang judi dan tidak ingin ada pelaporan, maka kemudian dia membelanjakan dibawah \$ 10.000, dengan sejumlah bill \$ 100,- atau \$10.-.

Dashney didakwa dengan dua tuduhan bahwa dia telah berusaha untuk dan telah berhasil menstrukturisasi transaksi untuk menggelapkan penyampaian CTR, dan dianggap melanggar 31 U.S.C. Pasal 5324(3), 5322(a) dan 18 U.S.C. Pasal 2. Pengadilan Banding yang dipimpin, Hakim Ketua Holloway, menetapkan bahwa: (1) Pemerintah tidak diharuskan membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau tidak tentang larangan menstrukturisasi transaksi menurut hukum pidana, dan (2) perilaku terdakwa dalam usahanya untuk menstrukturisasi satu "penyimpanan tunai" untuk menghindari persyaratan pelaporan seharusnya tidak dibagi menjadi dua dakwaan.

Terdakwa Dashney menyampaikan satu mosi untuk menolak "the indictment for vagueness and failure to charge knowledge of illegality." Dalam dengar pendapat tentang mosi tersebut ia menyatakan secara lebih khusus bahwa tuduhan tidak mendakwa telah mengetahui statuta anti-strukturisasi, 31U.S.C. Pasal 5324. Setelah perdebatan, hakim menolak mosi tersebut secara lisan, yang mendasarkan diri pada ketidakjelasan. Hakim selanjutnya menetapkan: "that knowledge of illegality is not required; the defendant would be intitled to an instructions that his act must be willful that is, " done volunteraly and intentionally and with the specified intent todo something the law forbids, not because of accident or other innocent reason" II R. at 28-29. The Judge said that statute does contain scienter element and that government would have to show that defendant had knowledge that CTRs had to be filed and that the defendant structured his transaction, attempting to evade those reporting requirement".

Dia dihukum dengan 24 bulan penjara sesuai dengan U.S Sentencing Commission, Guidelines Manual Pasal 281.3, Nov. 1989.³²

³¹ Ibid h. 337-339.

³² Ibid h. 336.

Anti – Money Laundering v. Kerahasiaan Bank

Keberatan yang mendasar terhadap peraturan pencucian uang datang dari konsumen yang memiliki “*right to privacy*” yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang Kerahasiaan Bank.³³

Kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan oleh bank dalam rangka pelaksanaan undang-undang anti pencucian uang, di beberapa negara telah menimbulkan perdebatan sehubungan dengan adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabahnya. Di Inggris sebelum 1984, pemberian informasi dari Bank kepada polisi dilakukan secara ad hoc, sanksi yang dijatuhkan mengikuti tuduhan kriminal. Tahun 1990, pihak yang berwajib dapat meminta bank menyampaikan informasi melalui perintah pengadilan. Dengan adanya kewajiban melaporkan karena timbulnya kecurigaan adanya kejahatan, kerahasiaan nasabah dikatakan hampir mati di Inggris.³⁴

“Rahasia bank” artinya institusi keuangan harus menjaga informasi yang diterimanya tentang kliennya dalam rangka rahasia bisnis dan konfidensial. Doktrin hukum dalam teori kontrak, keagenan dan perbuatan melanggar hukum mengakui dan melindungi kepentingan individu dalam “*financial privacy*.” Beberapa dari hak tersebut dicantumkan dalam “*Right to Financial Privacy Act*,” yang melindungi privacy keuangan individu dari campur tangan negara. Persaingan antara kepentingan individu dan

³³ Jeffrey Lowell Quillen, “Money Laundering,” Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 1991: 213. h. 231.

³⁴ Michael Levi, “Regulating Money Laundering – The Death of Bank Secrecy in the UK,” The British Journal of Criminology, vol. 31 No. 2 (Spring 1991) h. 113-114.

penegakkan hukum terdapat dalam tiga undang-undang di AS. “*Bank Secrecy Act (1970)*” memperlakukan kewajiban melaporkan oleh lembaga keuangan dalam rangka pembuktian adanya transaksi keuangan. Namun kemudian, “*Right to Financial Privacy Act (1978)*,” diundangkan sebagai jawaban terhadap keputusan Mahkamah Agung yang memungkinkan kewajiban dalam “*Bank Secrecy Act*” mengalahkan perlindungan “*Fourth Amendment*” dalam perkara United States v. Miller., 425 U.S 435 (1976), yang melindungi hak-hak individu atas “*financial privacy*.” Perkembangan selanjutnya, “*Money Laundering Control Act*” (1986) diundangkan untuk mencegah pasal-pasal dalam Bank Secrecy Act disalahgunakan oleh para pencuci uang. Dikatakan, karena pencucian uang itu terintegrasi dengan kegiatan kriminal, pada dasarnya adalah bukan kegiatan yang memiliki legitimasi untuk mengklaim kerahasiaan.³⁵

Adalah menarik untuk mengikuti usaha Amerika Serikat untuk menembus kerahasiaan bank di Cayman Island. Perbankan di Cayman Island merupakan industri komersil terbesar dan sumber utama penerimaan Pemerintah. Cayman Island menganut sistem Common Law Inggris, dimana basis hukum kerahasiaan bank di pulau tersebut bisa diurut kebelakang dalam perkara Tournier v. National Provincial & Union Bank of England (1924). Dalam perkara ini Pengadilan Inggris menyatakan adalah merupakan suatu kontrak antara Bank dan nasabahnya, kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan hal-hal yang menyangkut nasabahnya. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, bank harus bertanggung jawab secara perdata karena melanggar kontrak. Menganut prinsip tersebut “*Bank and Trust Companies Regulation Law*” Cayman menyatakan :

³⁵ Charles Thelen Plombeck, “Confidentiality and Disclosure: The Money Laundering Control Act of 1986 and Banking Secrecy,” The International Lawyer, vol. 22 No. 1 (Spring 1988) h. 70.

“Except for the purpose of the performance of his duties or the exercise of his functions under this law or when lawfully required to do so by any court of competent jurisdiction within the islands or under the provision of any law of the islands, no person shall disclose any information relating to any application by any person under the provisions of this law or to the affairs of a licensee or of any customer of a licensee which he has acquired in the performance of his functions under the law.”

Jika bank membukakan informasi nasabahnya, undang-undang tersebut menyatakan :

“guilty of an offense and liable on summary conviction to a fine not exceeding two thousand Cayman Island dollars or to a term of imprisonment not exceeding one year or both.”

Konflik antara undang-undang kerahasiaan bank Cayman Island dengan usaha penuntut AS terjadi dalam perkara United States v. Field, 429 U.S. 924 (1976). Field, warganegara Canada, Managing Director Cayman Island Bank, menolak untuk memberikan kesaksian didepan juri di Miami mengenai kegiatannya atas nama bank dan nasabahnya. Menurut Field, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya akan melanggar Amendment Kelima (Fifth Amendment) dan kesaksian tersebut akan melanggar Bank and Trust Companies Regulation Law (1966). Sependapat dengan Pengadilan District, Pengadilan banding (Fifth Circuit) menolak argumen Field, dan Pengadilan memusatkan persoalan kepada konflik antara *“enforcement of the subpoena and Field’s violation of Cayman Secrecy Law.”* Berdasarkan hukum Inggris, Pengadilan asing yang menginginkan informasi dari Inggris dan koloninya, harus mendapatkan perintah berdasarkan Evidence Act. Hal tersebut harus diajukan melalui Pengadilan Inggris atau koloninya, yang diperlukan untuk tuntutan kriminal. AS kemudian berhasil untuk pertama kali mempergunakan sistem hukum Cayman membuka rahasia yang dilindungi *“Secrecy Law”* dalam perkara United States v. Carver (1982).³⁶ Carver dan

³⁶ Jeffrey I. Horowitz, “Piercing Offshore Bank Secrecy Laws Used to Launder Illegal Narcotics Profits: The Cayman Islands Example,” Texas International Law Journal,” vol. 20 (1985) h. 150-155.

beberapa tertuduh lainnya bekerja untuk Raytheon Company yang mengadakan kontrak dengan Kerajaan Saudi Arabia bagi pembangunan sistem persenjataan udara dan pangkalan militer. Tertuduh didakwa melakukan manipulasi proses pelelangan sehingga tertuduh lainnya Interconex, Inc, mendapatkan subcontract untuk modular housing. Biaya yang menggelembung secara melawan hukum mencapai sekitar 3 juta dollar yang diterima Interconex dari pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

Sistem Common Law di Inggris dan AS menerapkan kewajiban bagi lembaga keuangan untuk tidak membuka catatan-catatan nasabahnya kepada pihak ketiga. Informasi keuangan menjadi suatu yang penting karena transaksi keuangan individu secara langsung dapat mencerminkan gaya hidup yang bersangkutan, kepentingan-kepentingan pribadinya, dan keyakinan politiknya. Dengan adanya akses kepada catatan keuangan pribadi, pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah dapat menentukan kepada kelompok mana atau lapisan sosial mana individu tersebut berpihak. Hal-hal tersebut merupakan hak-hak pribadi yang bersangkutan yang dilindungi oleh undang-undang.³⁷ Namun dalam Bank Secrecy Act Amerika, terdapat beberapa kekecualian. Selanjutnya pemerintah sekarang mewajibkan lembaga keuangan melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Kewajiban ini akan melindungi lembaga keuangan dari tuntutan ikut dalam pencucian uang. Dengan adanya otomatisasi dari sistem perbankan global dan mengalirnya dana-dana, fokus berubah dari privacy individu kepada pengakuan perlunya kesejahteraan publik.³⁸

³⁷ Matthew N. Kleiman, "The Right to Financial Privacy versus Computerized Law Enforcement: A New Fight in an Old Battle," Northwestern University Law Review, Vol. 86 No. 4 (1992) h. 1176.

³⁸ Mary Chatherine Green, "The Bank Secrecy and the Common Law : In Search of Financial Privacy," Arizona Journal of International and Comparative Law, vol. 7:2 (Spring 1990) h. 285.

Penutup

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia sudah “*comparable*” dengan undang-undang yang sama diberbagai negara. Kesiapan aparaturn hukum dan masyarakat kita terutama dari dunia penyedia jasa keuangan dan dunia bisnis lainnya perlu mendukung pelaksanaan undang-undang ini. Budaya hukum yang mendukung terlaksananya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentu mempengaruhi juga keberhasilan usaha kita memberantas tindak pidana narkotik, korupsi, penyelundupan dan lain sebagainya.
